



SKRIPSI

Judul:

Akibat hukum terdakwa tidak didampingi penasihat
hukum dalam peradilan pidana (perbandingan putusan
No.443/Pid.Sus/2021/PN Mnd dengan putusan
No.229/Pid.Sus/2018/PN Kag)

Disusun oleh:
KELVIN CHANDRA
NIM. 205180161

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

AKIBAT HUKUM TERDAKWA TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM DI
TINGKAT PENYIDIKAN PIDANA (Perbandingan Putusan No. 443/Pid.Sus/2021/Pn Mnd
Dengan Putusan No. 229/Pid.Sus/2018/Pn Kag)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Kelvin Chandra
NIM : 205180161

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024

Pengesahan

Nama : KELVIN CHANDRA
NIM : 205180161
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Akibat hukum terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dalam peradilan pidana (perbandingan putusan No.443/Pid.Sus/2021/PN Mnd dengan putusan No.229/Pid.Sus/2018/PN Kag)
Title : The legal consequences of the defendant not being accompanied by a legal advisor in the criminal trial (comparison of decision No.443/Pid.Sus/2021/PN Mnd with decision No.229/Pid.Sus/2018/PN Kag)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 18-Januari-2024.

Tim Penguji:

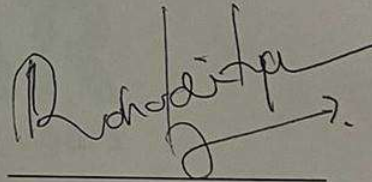
1. TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H., C.N., M.Hum., Dr., Prof
2. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
3. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

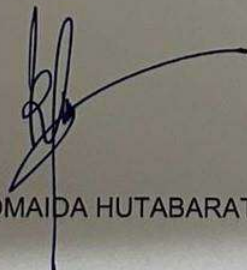
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

NIK/NIP: 10007001



Jakarta, 18-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

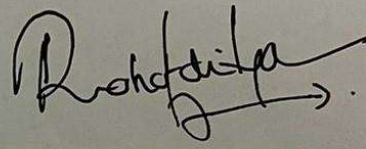
Persetujuan

Nama : KELVIN CHANDRA
NIM : 205180161
Program Studi : HUKUM
Judul : Akibat hukum terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dalam peradilan pidana (perbandingan putusan No.443/Pid.Sus/2021/PN Mnd dengan putusan No.229/Pid.Sus/2018/PN Kag)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 13-Desember-2023

Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001



ABSTRAK

- (A) Nama** : Kelvin Chandra
- (B) Judul** : Akibat Hukum Terdakwa Tidak Didampingi Penasihat Hukum di Tingkat Penyidikan Pidana (Perbandingan Putusan No. 443/Pid.Sus/2021/PN Mnd dengan Putusan No. 229/Pid.Sus/2018/PN Kag)
- (C) Halaman** : X + 28 + 86
- (D) Kata Kunci** : Terdakwa, Bantuan Hukum, Penasihat Hukum.
- (E) Isi** : Penasihat hukum memiliki peran krusial dalam menjalankan suatu bantuan hukum kepada tersangka maupun terdakwa agar dapat memahami dinamika proses peradilan di Indonesia, dengan tujuan utama memastikan keadilan dalam proses peradilan. Secara yuridis, hak atas bantuan hukum diatur oleh Pasal 54 KUHAP, yang menjamin bahwa tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum selama proses pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Skripsi ini bertujuan untuk menyelidiki konsekuensi hukum yang mungkin timbul apabila terdakwa tidak mendapat pendampingan hukum pada tahap penyidikan pidana, sambil menelaah perbandingan implikasi hukum Pasal 56 KUHAP terhadap dua putusan, yaitu Putusan No. 443/Pid.Sus/2021/PN Mnd dan Putusan No. 229/Pid.Sus/2018/PN Kag. Dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa dampak hukum yang muncul apabila tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum pada tahap penyidikan belum memenuhi asas kepastian, atau dengan kata lain, terdapat kondisi tertentu yang dapat memicu perbedaan dampak akibat dari keadaan tersebut. Sementara itu, analisis terhadap Putusan No. 443/Pid.Sus/2021/PN Mnd menunjukkan bahwa Pasal 56 KUHAP mengakibatkan penghentian persidangan saat Putusan Sela dikeluarkan karena terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Sebaliknya, pada Putusan No. 229/Pid.Sus/2018/PN Kag, Pasal 56 KUHAP tidak menyebabkan penghentian persidangan karena terdakwa telah menyetujui untuk melepaskan hak bantuan hukumnya.
- (F) Acuan** : 39 (1975-2023), 5 Peraturan Perundang-Undangan, 2 Putusan, 19 Jurnal.
- (G) Pembimbing** : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
- (H) Penulis** : Kelvin Chandra

ABSTRACT

- (A) Nama** : Kelvin Chandra
- (B) Judul** : Legal Consequences of the Defendant Not Being Accompanied by Legal Counsel at the Criminal Investigation Level (Comparative of Decision No. 443/Pid.Sus/2021/PN Mnd with Decision No. 229/Pid.Sus/2018/PN Kag)
- (C) Halaman** : X + 28 + 86
- (D) Kata Kunci** : *Defendant, Legal Aid, Legal Advisor.*
- (E) Isi** : *Legal advisors have a central role in providing legal assistance to suspects and/or defendants to understand the dynamics of the criminal justice system in Indonesia, with the main aim of ensuring fairness in the judicial process. Juridically, the right to legal assistance is mandated by Article 54 of KUHAP, which states that suspects or defendants have the right to receive legal assistance during the examination process, in accordance with applicable legal provisions. This thesis aims to explore the legal consequences that might occur if the defendant does not receive legal assistance at the criminal investigation stage, while examining the comparison of the legal implications of Article 56 of the Criminal Procedure Code for two decisions, namely Decision No. 443/Pid.Sus/2021/PN Mnd and Decision no. 229/Pid.Sus/2018/PN Kag. Using normative legal research methods, this research was conducted qualitatively by analyzing legal norms contained in statutory regulations. The results of the discussion in this thesis show that the legal consequences that arise if the suspect or defendant is not accompanied by a legal advisor at the investigation level do not meet the principle of certainty, or in other words there are certain conditions which trigger differences in the consequences caused by this. Meanwhile, Analysis of Decision No. 443/Pid.Sus/2021/PN Mnd shows that Article 56 of the Criminal Procedure Code caused the trial to stop when the Interim Decision was issued, because the defendant was not accompanied by a legal advisor. On the other hand, in Decision no. 229/Pid.Sus/2018/PN Kag, Article 56 of the Criminal Procedure Code does not result in the termination of the trial, because the defendant has agreed to waive his right to legal aid.*
- (F) References** : 39 (1975-2023), 5 Law, 2 Decisions, 19 Articles / Journals.
- (G) Supervisor** : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
- (H) Author** : Kelvin Chandra

Pernyataan

Nama : KELVIN CHANDRA
NIM : 205180161
Program Studi : HUKUM
Judul : Akibat hukum terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dalam peradilan pidana (perbandingan putusan No.443/Pid.Sus/2021/PN Mnd dengan putusan No.229/Pid.Sus/2018/PN Kag)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13-Desember-2023
Yang menyatakan



KELVIN CHANDRA
NIM. 205180161

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul Akibat Hukum Terdakwa Tidak Didampingi Penasihat Hukum di Tingkat Penyidikan Pidana (Perbandingan Putusan No. 443/Pid.Sus/2021/PN Mnd dengan Putusan No. 229/Pid.Sus/2018/PN Kag). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (FH Untar).

Penulisan ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan FH Untar;
2. Ibu Rugun Romaida, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 FH Untar;
3. Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi;
4. Ibu Christine, S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium FH Untar; dan
5. Seluruh keluarga, saudara, rekan, maupun sahabat yang tidak dapat disebut satu per satu.

Demikian dapat saya sampaikan. Saya berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemerintah memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan referensi yang berguna dan menjadi landasan bagi penelitian di masa yang akan datang.

Jakarta, 22 Desember 2023

Kelvin Chandra

DAFTAR ISI

AKIBAT HUKUM TERDAKWA TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN PIDANA (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN NO. 443/PID.SUS/2021/PN MND DENGAN PUTUSAN NO. 229/PID.SUS/2018/PN KAG)

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II KERANGKA TEORITIS	24
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana	24
B. Teori Keadilan	27
C. Teori Hak Asasi Manusia	31
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	37
A. Ketentuan Peradilan Pidana di Indonesia	37
B. Hak Bantuan Hukum di Indonesia.....	41
C. Kronologi Perkara dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Manado Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Mnd (Putusan No. 443/Pid.Sus/2021/PN Mnd)	43
1. Dakwaan Kesatu	43
2. Dakwaan Kedua	44
D. Kronologi Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN Kag	45

E. Perbandingan Putusan.....	47
F. Data Hasil Wawancara	50
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	54
A. Dilema Penerapan Hak Bantuan Hukum.....	54
B. Optimalisasi Hak Bantuan Hukum	65
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74